

Peluang dan Tantangan Digitalisasi Desa: Studi Pada Layanan Perpustakaan Desa Berbasis Digital

Andi Ferawati Mappatunru¹, Rumsari Hadi Sumarto²

^{1,2}Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD", Yogyakarta

Corresponding Author: verasyarif808@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.47431/jirreg.v9i1.721>

Article Info

Article History;

Received:

2025-07-03

Revised:

2025-08-05

Accepted:

2025-10-01

Abstrak: Perkembangan informasi dan teknologi yang cepat dan masif telah mendorong seluruh sektor dan level pemerintahan untuk mengandalkan digitalisasi dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Tak terkecuali di level pemerintahan desa: mau tidak mau, siap atau tidak, harus menyelenggarakan pemerintahannya dengan berbasis digital. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peluang dan tantangan digitalisasi desa studi kasus layanan perpustakaan desa berbasis digital. Penelitian ini berusaha menjawab pertanyaan kritis tentang dinamika digitalisasi desa, dampak digitalisasi desa terhadap layanan perpustakaan desa berbasis digital, dan peluang dan tantangan digitalisasi desa dalam pengembangan layanan perpustakaan desa digital. Dengan menggunakan metode kajian pustaka dan penelitian terdahulu secara kritis, penelitian ini menyimpulkan bahwa peluang pengembangan perpustakaan desa berbasis digital sebagai dampak proses digitalisasi adalah: (1) meningkatnya efisiensi pengelolaan data dan informasi (2) semakin mudahnya akses masyarakat terhadap berbagai layanan informasi, dan (3) semakin meluasnya jangkauan masyarakat terhadap berbagai jenis pelayanan publik di desa termasuk layanan perpustakaan desa. Tantangan utama yang ditemukan dalam pengembangan layanan perpustakaan digital di desa, mencakup: (1) keterbatasan infrastruktur dalam koneksi internet, perangkat komputer, dan ketersediaan listrik, (2) minimnya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana digital dan untuk pelatihan sumber daya manusia, (3) rendahnya kemampuan pengelola perpustakaan dalam mengoperasikan sistem digital yang menandakan perlunya peningkatan kapasitas dan pendidikan khusus, serta (4) masih terbatasnya masyarakat desa yang memiliki akses terhadap jaringan internet. Sedangkan hambatan yang ditemukan dalam penerapan layanan perpustakaan digital di antaranya adalah: (1) jumlah koleksi digital yang belum memadai, (2) tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah, dan (3) keterbatasan dalam hal pemeliharaan sistem maupun pembaruan data secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Digitalisasi desa; Perpustakaan Digital; Peluang dan Tantangan.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi yang sangat cepat serta merata mendorong seluruh sektor kehidupan, termasuk pemerintahan di tingkat pusat, daerah, hingga desa, untuk melakukan transformasi menuju tata kelola berbasis digital. Pada level pedesaan, pemerintahan desa kini dituntut untuk mengimplementasikan sistem administrasi dan pelayanan publik yang memanfaatkan teknologi digital. Proses digitalisasi di desa diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam sistem tata kelola pemerintahan. Ketika proses ini

disesuaikan dengan karakteristik sosial dan budaya lokal serta melibatkan partisipasi aktif warga, digitalisasi desa dapat menjadi kekuatan penting dalam menciptakan perubahan positif (1). Dalam konteks penelitian ini, digitalisasi desa diartikan sebagai penerapan teknologi digital dalam seluruh aktivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mulai dari pencatatan administrasi secara elektronik, pelayanan publik daring, hingga penggunaan *platform* komunikasi berbasis internet. Tujuan utama dari digitalisasi desa adalah untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, serta kualitas pelayanan publik di lingkungan pedesaan.

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam penerapan digitalisasi di desa adalah keterbatasan akses terhadap teknologi digital. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti infrastruktur yang belum memadai, jaringan internet yang tidak stabil, serta rendahnya tingkat literasi digital masyarakat (2). Kondisi tersebut memunculkan kesenjangan digital antara wilayah desa dan kota, yang pada akhirnya dapat memperlebar jurang pembangunan di antara keduanya (1) (Sovetova dalam Sarjito, A., 2023). Namun demikian, di balik tantangan tersebut, proses transformasi digital di pedesaan juga membuka peluang besar bagi pemberdayaan masyarakat, terutama dalam meningkatkan akses terhadap informasi, pendidikan, layanan kesehatan, dan berbagai fasilitas publik lainnya (3) (Meyn dalam Sarjito, A., 2023).

Digitalisasi desa dengan demikian memiliki dua sisi yang tidak dapat dipisahkan, yakni sisi positif dan sisi negatif. Dari sisi positif, digitalisasi membantu meningkatkan efisiensi serta kualitas pelayanan pemerintahan desa. Sementara dari sisi negatif, penerapan teknologi digital dapat menambah beban administratif dan tuntutan kompetensi baru bagi aparat desa. Sejalan dengan pandangan Sarjito (2023), implementasi digitalisasi desa memiliki manfaat di satu sisi, namun juga menghadirkan tantangan di sisi lainnya yang perlu diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan di desa.

- 1) Menurut Sarjito (2023), beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan digitalisasi desa antara lain:
- 2) Akses terhadap layanan publik menjadi lebih mudah dan cepat, karena teknologi digital memungkinkan warga desa terhubung dengan layanan pendidikan, kesehatan, dan pemerintahan;
- 3) Konektivitas sosial meningkat melalui kolaborasi antara warga, pelaku usaha, dan pemerintah yang berdampak pada efektivitas pengambilan keputusan;
- 4) Pertumbuhan ekonomi desa terdorong dengan hadirnya inovasi digital yang memperkuat sektor ekonomi lokal dan membuka lapangan kerja baru; serta
- 5) Pengelolaan sumber daya alam menjadi lebih efisien dan berkelanjutan berkat penerapan teknologi yang ramah lingkungan.

Namun demikian, Sarjito (2023) juga mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam implementasi digitalisasi desa, antara lain:

- (1) Terbatasnya infrastruktur jaringan internet di wilayah pedesaan;
- (2) Rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat;
- (3) Keterbatasan pendanaan untuk membangun dan memelihara fasilitas digital; serta
- (4) Minimnya dukungan regulasi dan kebijakan yang mendukung keberlanjutan program digitalisasi di desa.

Salah satu aspek penting yang menjadi bagian dari transformasi digital desa adalah pelayanan publik berbasis teknologi, khususnya dalam bidang perpustakaan desa digital. Keberadaan perpustakaan digital merupakan konsekuensi logis dari penerapan digitalisasi di pemerintahan desa. Perpustakaan desa digital dapat dipahami sebagai lembaga yang dikelola oleh pemerintah desa, di mana seluruh proses pengelolaan mulai dari pengadaan, pengolahan, penyimpanan, peminjaman, hingga distribusi bahan Pustaka dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan

internet. Keberadaan perpustakaan digital di desa memiliki peran strategis dalam mendukung program pendidikan, pembelajaran sepanjang hayat, serta penyediaan informasi yang relevan bagi sektor ekonomi produktif seperti pertanian, peternakan, perikanan, dan usaha kecil lainnya.

Selain itu, perpustakaan digital juga berperan dalam pelestarian budaya lokal melalui dokumentasi dan arsip digital mengenai warisan budaya desa (4)(Abdurrahman & Susilawati, 2024; Zulfah & Aisa, 2018). Seperti halnya digitalisasi pemerintahan desa, pengelolaan perpustakaan desa berbasis digital juga menghadapi berbagai kendala, seperti kesenjangan akses antara perpustakaan kota dan desa, keterbatasan infrastruktur, jaringan internet yang lemah, serta rendahnya kemampuan literasi digital masyarakat. Meski demikian, di balik keterbatasan tersebut terdapat optimisme bahwa keberadaan perpustakaan desa digital dapat menjadi sarana penting dalam memperkuat literasi masyarakat desa, mendukung pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peluang dan tantangan digitalisasi desa, khususnya dalam penyelenggaraan layanan perpustakaan desa berbasis digital. Dengan menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*), penelitian ini akan membahas dinamika digitalisasi desa, dampaknya terhadap layanan perpustakaan digital, serta mengidentifikasi berbagai peluang dan hambatan dalam pengembangannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (*literature review*) dengan pendekatan Rapid Evidence Assessment (REA). Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menghimpun data dan informasi secara cepat dari berbagai sumber literatur yang relevan. Metode REA dinilai tepat untuk menelaah peluang dan tantangan digitalisasi desa dengan studi kasus pada layanan perpustakaan desa berbasis digital. Pendekatan Rapid Evidence Assessment (REA) merupakan suatu prosedur sistematis yang bertujuan untuk meninjau dan mengevaluasi secara kritis berbagai bukti ilmiah yang tersedia dalam waktu relatif singkat, namun tetap menjaga keseimbangan antara ketepatan analisis dan keluasan cakupan data. Metode ini berfokus pada penelusuran literatur ilmiah yang meliputi hasil kajian teoritis maupun temuan empiris, yang berkaitan langsung dengan perumusan masalah, pertanyaan penelitian, serta strategi intervensi yang relevan dengan topik kajian.

Pelaksanaan metode REA dalam penelitian ini diadaptasi dari tahapan yang dikemukakan oleh (5)Iqbal (2023), yang meliputi beberapa langkah berikut:

Langkah pertama, melakukan perumusan masalah penelitian, yang dalam konteks ini mencakup dinamika digitalisasi desa, pengaruh digitalisasi terhadap layanan perpustakaan desa berbasis digital, serta identifikasi peluang dan tantangan dalam pengembangan layanan perpustakaan desa digital di masa mendatang.

Langkah kedua, yaitu pencarian dan seleksi literatur (*literature searching and filtering*). Pada tahap ini peneliti melakukan pencarian berbagai sumber literatur yang relevan untuk mendukung analisis terhadap fokus penelitian. Proses pencarian dilakukan dengan menggunakan kombinasi kata kunci “digitalisasi desa” dan “perpustakaan digital”. Setelah literatur terkumpul, dilakukan proses inklusi dan eksklusi.

- Inklusi mencakup penyaringan artikel yang diterbitkan pada jurnal ilmiah bereputasi (nasional maupun internasional) dengan rentang waktu publikasi antara tahun 2015 hingga 2025.
- Eksklusi dilakukan dengan menyingkirkan literatur yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan topik dan pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya.

Langkah ketiga, yaitu analisis data. Analisis dilakukan dengan pendekatan meta-analisis non-statistik, yakni teknik untuk mengintegrasikan, menilai, dan menafsirkan berbagai hasil kajian literatur menjadi satu kesimpulan tematik secara kualitatif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti

menyusun sintesis komprehensif dari beragam penelitian terdahulu tanpa menggunakan perhitungan statistik.

Langkah keempat, yakni penyusunan kesimpulan. Hasil sintesis dari proses meta-analisis digunakan untuk mengidentifikasi elemen-elemen pokok serta tema-tema utama yang muncul dalam penelitian ini. Elemen dan tema tersebut kemudian dikelompokkan ke dalam tiga fokus utama, yaitu:

1. Pemahaman konseptual mengenai digitalisasi desa,
2. Dampak digitalisasi terhadap layanan perpustakaan desa berbasis digital, dan
3. Peluang serta tantangan pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis digital di masa depan.

Hasil pengelompokan elemen dan tema ini menjadi dasar penyusunan kesimpulan akhir penelitian yang menggambarkan temuan utama dari proses kajian pustaka dengan pendekatan REA.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Digitalisasi Desa

Kajian mengenai digitalisasi desa saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat (6)(Lailiyah, 2022; (7)Irfan & Anirwan, 2024; (8)Christover et al., 2023; (9)Kusuma et al., 2022). Penerapan digitalisasi desa dimaksudkan untuk menjadikan pembangunan di tingkat desa lebih terarah, efisien, serta efektif dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Program digitalisasi desa merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat dengan semboyan “*membangun Indonesia dari desa*”, yang bertujuan mempercepat proses pembangunan pedesaan (Lailiyah, 2022). Menurut Irfan dan (10)Anirwan (2024), digitalisasi desa kini menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan pedesaan di Indonesia.

Christover et al. (2023) menjelaskan bahwa digitalisasi merupakan proses konversi data atau informasi dari bentuk fisik menjadi format digital yang dapat diolah menggunakan perangkat teknologi informasi. Dalam rangka memperbaiki kualitas layanan publik, banyak pemerintah desa telah memanfaatkan berbagai platform digital, seperti situs web resmi desa, aplikasi berbasis gawai, dan media sosial. Dengan demikian, digitalisasi desa dalam konteks penelitian ini diartikan sebagai proses penyelenggaraan pemerintahan desa melalui penerapan sistem informasi dan teknologi berbasis komputer serta internet. Tujuan utamanya adalah memperkuat tata kelola pemerintahan desa agar masyarakat memperoleh akses informasi dan layanan secara lebih cepat dan transparan. Pada akhirnya, digitalisasi desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Hasil sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa digitalisasi desa sangat penting diterapkan untuk memperkuat pelaksanaan kewenangan desa. Program ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi pemerintahan, memperbaiki pelayanan publik, serta membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat (Irfan & Anirwan, 2024). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, kewenangan desa meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, keamanan serta ketertiban, hingga pengelolaan keuangan desa. Dalam pelaksanaannya, banyak desa di Indonesia telah menggunakan berbagai aplikasi digital, namun sebagian besar sistem tersebut bersifat *top-down*, dikembangkan oleh pemerintah pusat atau daerah, bukan oleh pemerintah desa secara mandiri. Akibatnya, proses implementasi digitalisasi desa masih dihadapkan pada sejumlah hambatan, seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi digital masyarakat, dan lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan (Irfan & Anirwan, 2024).

Secara konseptual, digitalisasi desa merupakan perwujudan dari gagasan pemerintahan elektronik (*e-government*). Istilah ini mulai diperkenalkan di Indonesia melalui Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan Pendetayagunaan Telematika sebagai langkah awal

menuju *good governance*. Kemudian diperkuat dengan (11)Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, yang menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas layanan publik (Christover et al., 2023).

Dengan demikian, digitalisasi desa dapat dipahami sebagai wujud implementasi *E-Government* di tingkat lokal, yang berperan sebagai katalisator dalam transformasi tata kelola pemerintahan desa. Melalui penerapan teknologi informasi, pemerintah desa dapat meningkatkan kualitas layanan publik, transparansi administrasi, serta efektivitas pembangunan lokal. Salah satu contoh penerapannya adalah sistem administrasi kependudukan berbasis digital, di mana data penduduk dikelola menggunakan basis data terintegrasi, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat dan akurat. Oleh karena itu, digitalisasi desa dapat disimpulkan sebagai proses penyimpanan, pengelolaan, dan pertukaran informasi secara elektronik melalui perangkat komputer di berbagai tempat dan waktu.

Dampak Digitalisasi Desa terhadap Layanan Perpustakaan Desa Berbasis Digital

Berbagai hasil kajian literatur menegaskan bahwa digitalisasi desa merupakan suatu keniscayaan. Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat membawa perubahan signifikan dalam kehidupan masyarakat, termasuk di wilayah pedesaan (12)(Lapuz, 2023; Sari & (10)Diana, 2024). Kemajuan ini berperan penting dalam mempersempit kesenjangan informasi antara daerah perkotaan dan pedesaan. Akses internet yang semakin luas memungkinkan masyarakat desa memperoleh informasi global secara bebas, sehingga memperkaya pengetahuan dan wawasan mereka (3)(Fadhillah & Yuniarti, 2023; Sari & Diana, 2024).

Namun demikian, digitalisasi juga membawa dampak negatif. Masyarakat pedesaan menjadi lebih rentan terhadap penyebaran informasi palsu (*hoaks*) atau kejahatan daring, seperti *catfishing*, di mana seseorang menggunakan identitas palsu untuk menipu orang lain. Selain itu, penyebaran konten negatif, ujaran kebencian, serta misinformasi menjadi lebih mudah dan cepat(13) (Ariyaningsih et al., 2023; Sari & Diana, 2024).

Salah satu sektor yang terdampak langsung dari proses digitalisasi desa adalah layanan perpustakaan desa. Digitalisasi mendorong perpustakaan untuk bertransformasi dari bentuk konvensional menjadi perpustakaan berbasis digital, dengan dukungan infrastruktur seperti komputer, jaringan internet, serta koleksi buku elektronik. Tidak hanya itu, keberhasilan transformasi juga bergantung pada kesiapan sumber daya manusia dan tingkat partisipasi masyarakat desa (4)(Abdurrahman & Susilawati, 2024).

Secara umum, perpustakaan berfungsi sebagai tempat penyimpanan dan penyebaran informasi. Menurut Sulisty-Basuki ((14) dalam Asnawi, 2015), perpustakaan merupakan ruang atau lembaga yang mengelola koleksi bahan pustaka secara sistematis agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Fungsi perpustakaan tidak hanya sebatas penyedia bacaan, tetapi juga sebagai pusat informasi, riset, pelestarian budaya, serta sarana rekreasi edukatif. Perpustakaan desa sendiri merupakan bagian dari perpustakaan umum yang berada di tingkat pemerintahan desa. Berdasarkan (15)Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, keberadaan perpustakaan desa memiliki peran strategis dalam mendukung pendidikan, pembangunan, serta pelestarian budaya lokal (Asnawi, 2015; Abdurrahman & Susilawati, 2024).

Asnawi (2015) menambahkan bahwa Perpustakaan Desa/Kelurahan berfungsi untuk meningkatkan kegiatan pendidikan masyarakat pedesaan dan menjadi bagian integral dari pembangunan desa. Tujuan utamanya mencakup: mendukung program wajib belajar, pendidikan

seumur hidup, menyediakan koleksi buku pengetahuan dan keterampilan, menumbuhkan minat baca, melestarikan budaya lokal, serta memberikan hiburan yang bersifat mendidik bagi masyarakat.

Penelitian (16) Nugraha (2018) dalam Christover et al. (2023) mengidentifikasi tiga faktor utama keberhasilan penerapan digitalisasi dalam pelayanan publik, yang juga relevan dengan pengembangan perpustakaan digital di desa, yaitu dukungan (*support*), kapasitas (*capacity*), dan manfaat (*value*).

1. Dukungan (*support*) mencakup partisipasi dari pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Pemerintah desa perlu melibatkan warga dalam perencanaan dan penerapan digitalisasi perpustakaan.
2. Kapasitas (*capacity*) menekankan pentingnya peningkatan kompetensi sumber daya manusia, baik aparatur desa maupun pengelola perpustakaan, agar mampu beradaptasi dengan sistem digital.
3. Manfaat (*value*) berkaitan dengan sejauh mana masyarakat merasakan dampak positif dari keberadaan perpustakaan digital sebagai sarana peningkatan literasi sosial, ekonomi, dan pendidikan (Christover et al., 2023).

Penelitian oleh Abdurrahman dan Susilawati (2024) di Perpustakaan Desa Buluh Cina, Kabupaten Kampar, menunjukkan bahwa meskipun desa tersebut telah memasuki era digital, pengelolaan perpustakaan masih manual. Melalui program pengabdian masyarakat, mereka kemudian mengembangkan sistem perpustakaan berbasis digital dengan memanfaatkan SLiMS 9 Bulian (*Senayan Library Management System*). Implementasi teknologi ini memungkinkan penggunaan barcode scanner, pendataan buku secara digital, serta pengelolaan data berbasis situs web. Hasilnya, pengelolaan perpustakaan menjadi lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan jumlah kunjungan masyarakat ke perpustakaan.

Peluang dan Tantangan Pengembangan Layanan Perpustakaan Desa Berbasis Digital

Perkembangan perpustakaan desa digital di Indonesia menghadapi berbagai peluang sekaligus tantangan. Menurut (3) Kusuma et al. (2022), peluang tersebut antara lain didorong oleh dukungan pemerintah pusat, ketersediaan sumber daya manusia, otonomi desa, serta partisipasi masyarakat yang semakin meningkat. Pemerintah di berbagai tingkatan juga tengah melakukan upaya terencana dan sistematis untuk mentransformasi perpustakaan konvensional menjadi perpustakaan digital modern. Transformasi ini tidak hanya mencakup aspek fisik atau infrastruktur, tetapi juga menyentuh fungsi, layanan, dan peran pustakawan. Di era digital, perpustakaan beralih fungsi menjadi pusat literasi teknologi dan pengetahuan yang mendorong inovasi serta penyebaran informasi (Asnawi, 2015).

Di sisi lain, sejumlah tantangan masih dihadapi dalam proses transformasi ini, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perpustakaan, keterbatasan fasilitas, manajemen yang belum optimal, serta minimnya pembinaan dari pemerintah (Asnawi, 2015). Tantangan terbesar adalah memastikan keterlibatan aktif masyarakat dalam mendukung dan memanfaatkan fasilitas perpustakaan digital. Meski demikian, apabila dikelola dengan baik dan mendapat dukungan dari berbagai pihak, perpustakaan desa berbasis digital memiliki potensi besar untuk berkembang menjadi pusat pemberdayaan dan pembelajaran masyarakat.

Abdurrahman dan Susilawati (2024) menyarankan beberapa langkah strategis untuk meningkatkan partisipasi dan kunjungan masyarakat ke perpustakaan desa, seperti menyelenggarakan kegiatan literasi menarik, memperbarui koleksi buku, menciptakan ruang baca yang nyaman, serta menyediakan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Bukti empiris dari proyek digitalisasi Perpustakaan Desa Buluh Cina menunjukkan bahwa penerapan sistem berbasis website dengan dukungan barcode tidak hanya memudahkan administrasi dan peminjaman buku, tetapi juga meningkatkan efisiensi layanan dan memperluas akses informasi bagi masyarakat. Keberhasilan

tersebut menunjukkan bahwa digitalisasi mampu memperkuat literasi masyarakat desa dan menjadi pijakan penting menuju modernisasi perpustakaan desa di era digital.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil telaah pustaka dan pembahasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai peluang serta perkembangan yang cukup berarti dalam upaya pengembangan perpustakaan desa berbasis digital. Peluang yang muncul dari proses digitalisasi yang berpengaruh terhadap layanan perpustakaan desa antara lain: (1) peningkatan efisiensi dalam pengelolaan data dan informasi secara digital, (2) semakin mudahnya akses masyarakat terhadap berbagai layanan informasi, serta (3) kemampuan teknologi digital dalam memperluas jangkauan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan administrasi pemerintahan desa.

Namun demikian, di balik berbagai potensi tersebut, perpustakaan digital di wilayah pedesaan juga dihadapkan pada sejumlah tantangan. Tantangan utama yang ditemukan mencakup: (1) keterbatasan infrastruktur, termasuk koneksi internet, perangkat komputer, dan ketersediaan listrik, (2) minimnya anggaran untuk pengadaan sarana dan prasarana digital serta pelatihan sumber daya manusia, (3) rendahnya kemampuan pengelola perpustakaan dalam mengoperasikan sistem digital yang menandakan perlunya peningkatan kapasitas dan pendidikan khusus, serta (4) masih terbatasnya masyarakat desa yang memiliki akses terhadap jaringan internet.

Selain itu, dalam penerapan layanan perpustakaan digital juga masih terdapat hambatan lain, seperti: (1) jumlah koleksi digital yang belum memadai, (2) tingkat partisipasi masyarakat yang masih rendah, dan (3) keterbatasan dalam hal pemeliharaan sistem maupun pembaruan data secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, khususnya Program Magister Ilmu Pemerintahan, atas dukungan akademik dan bimbingan yang telah diberikan selama proses penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada rekan-rekan peneliti dan akademisi yang karya-karyanya telah menjadi referensi penting dalam pembahasan mengenai digitalisasi desa dan pengembangan layanan perpustakaan desa berbasis digital.

Selain itu, penulis berterima kasih kepada pemerintah desa, pustakawan, serta masyarakat desa yang telah memberikan inspirasi, data, dan pandangan praktis terkait peluang serta tantangan transformasi digital di tingkat desa. Kontribusi mereka sangat berharga dalam penyusunan analisis dan kesimpulan penelitian ini.

REFRENSI

1. Sarjito A. Dampak digitalisasi administrasi perdesaan di negara berkembang. *J Ilm Ilmu Adm.* 2023;13(2), 106.
2. Soerjono, H., Munawar, Z., Karmana, D., Fudsyi, M. I., & Putri NI. Penerapan strategi digital untuk pemberdayaan masyarakat desa. 2024;
3. Fadhilah, P., & Yuniarti A. Pemberdayaan UMKM: Melihat Peluang Bisnis UMKM di Era Digital di Desa Ujunge Kecamatan Tanasitolo Kabupaten Wajo. *J Pengabd Masy Dan Ris Pendidik.* 2023;2(1), 291–.
4. Abdurrahman, R., & Susilawati A. Digitalisasi Perpustakaan Desa Buluh Cina, Kabupaten Kampar Provinsi Riau. *BATOBO. J Pengabd Kpd Masy.* 2024;2(2), 67–7.
5. Iqbal A. Framework Analysis Using The Rapid Evidence Assessment (REA). *J Teknol Sepuluh Nop.* 2023;15740.

6. Lailiyah K. Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *J Riset, Inov Dan Teknol Kabupaten Batang*. 2022;6(2), 26–3.
7. Irfan, B., & Anirwan A. Explorasi implementasi digitalisasi desa: Studi literatur. *Indones J Intellect Publ*. 2024;5(1), 1–8.
8. Christover, D., Hidayattulah, A. S., & Mawarni I. Penerapan Konsep-Konsep Digitalisasi dalam Pelayanan Publik di Kantor Desa Manunggal Jaya Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara. *J Res Dev Public Policy*. 2023;2(2), 199-.
9. Kusuma, T. P., Nurjaman, A., Salahudin, S., & Malawat SH. Analisis Tantangan Dan Potensi Pengembangan Digitalisasi Desa. *AS-SIYASAH. J Ilmu Sos Dan Ilmu Polit*. 2022;7(2), 100-.
10. Sari, J. A., & Diana BA. Dampak Transformasi Digitalisasi terhadap Perubahan Perilaku Masyarakat Pedesaan. *J Pemerintah dan Polit*. 2024;9(2), 88–9.
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2001 Tentang Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
12. Lapuz MCM. The role of local community empowerment in the digital transformation of rural tourism development in the Philippines. *Technology in Society*. 74, 102308.
13. Ariyaningsih, S., Andrianto, A. A., Kusuma, A. S., & Prastyanti RA. Korelasi Kejahatan Siber dengan Percepatan Digitalisasi di Indonesia . *Justisia J Ilmu Huk*. 2023;1(1), 1–11.
14. Asnawi A. Perpustakaan desa sebagai sumber layanan informasi utama. *Media Pustak*. 2015;22(3), 34-.
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi Perangkat Daerah.
16. Zulfah, M. A., & Aisa A. Transformasi Perpustakaan Desa:(Studi Kasus Di Perpustakaan Desa Podoroto Kecamatan Kesamben Kabupaten Jombang). *Multidisiplin. Pros Semin Nas*. 2018;Vol. 1, pp.